

BAB III

PERMASALAHAN PERUSAHAAN

3.1 Analisa Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Perusahaan

3.1.1 Temuan Masalah

Salah satu kegiatan dari setiap Koperasi adalah memberikan kredit kepada anggota, begitu juga dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan. Sesuai dengan visi dan misi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Tetapi setelah kredit diberikan kepada anggota yaitu pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan yang mengajukan kredit, permasalahan yang seringkali ditemukan adalah pembayaran kredit yang lewat dari tanggal jatuh tempo atau biasa sering disebut penunggakan kredit. Permasalahan ini belum bisa dihindari oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan.

Ada beberapa faktor internal yang menyebabkan timbulnya penunggakan, yaitu sebagai berikut :

- Analisa kredit yang tidak cermat
- Kurangnya pengawasan kredit
- Analisa laporan keuangan yang tidak cermat

Kemudian terdapat juga faktor eksternal, yaitu dari kesengajaan anggota, ada anggota yang berlaku menyimpang. Kerugian bagi KPRI jika ada penunggakan kredit adalah kurangnya cadangan dana yang juga mengakibatkan anggota koperasi lain sulit mendapat pinjaman kredit untuk keperluan anggota koperasi, sehingga KPRI berusaha mengatasi masalah penunggakan kredit.

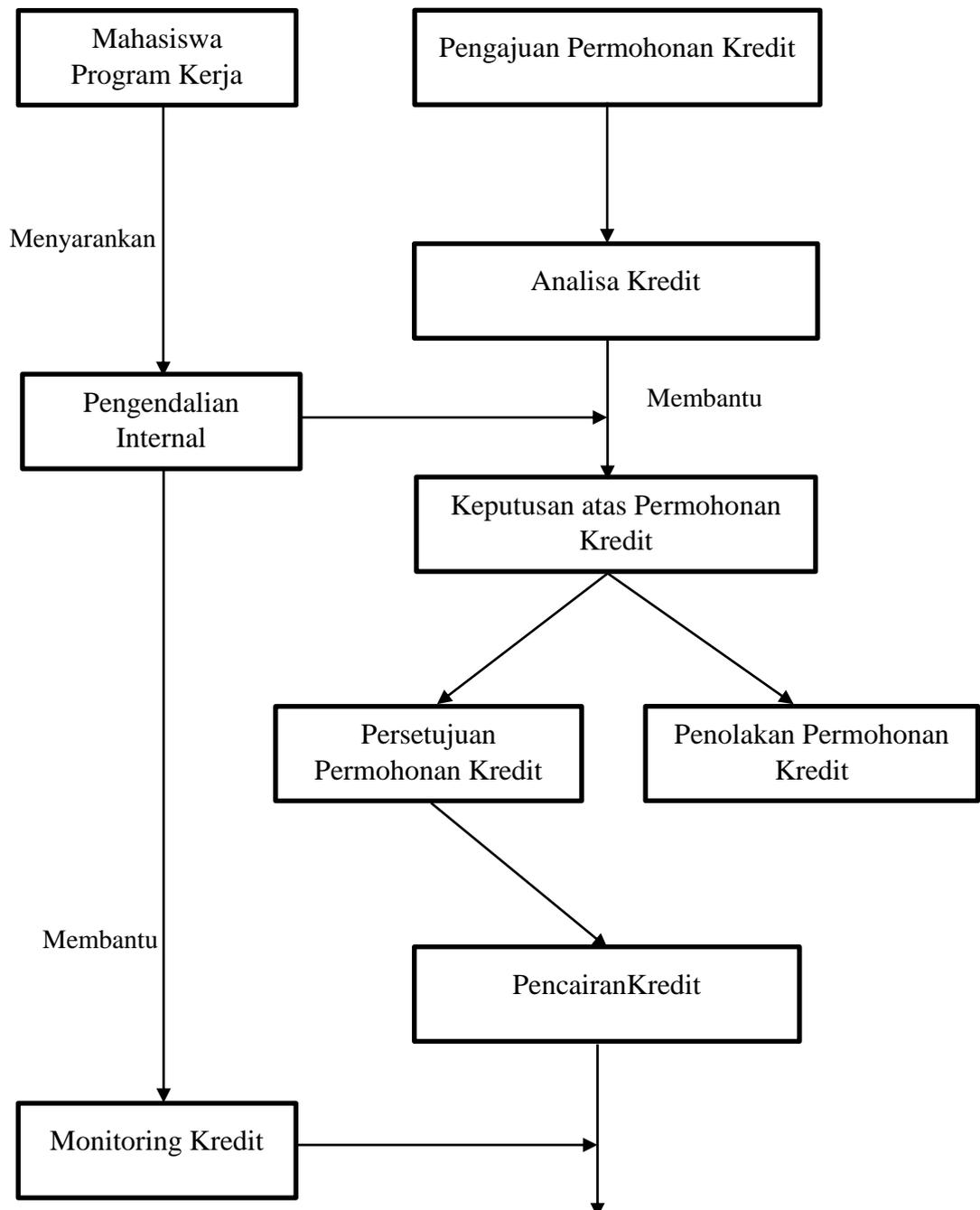
3.1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan temuan masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja hal – hal yang perlu diperhatikan pada saat mempertimbangkan untuk memberikan kredit kepada anggota koperasi ?
2. Bagaimana cara memberikan kredit yang tepat sasaran kepada anggota koperasi ?
3. Bagaimana cara mengatasi masalah pembayaran kredit yang lewat dari tanggal jatuh tempo ?
4. Bagaimana prosedur pemberian kredit yang baik dan benar ?

3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Berikut adalah diagram alir yang digunakan sebagai kerangka pemecahan masalah yang dihadapi :





PelunasanKredit

Gambar 3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah

3.2 Landasan Teori

3.2.1 Pengendalian Internal

Dalam sebuah perusahaan diperlukan bagian pengendalian internal agar pekerjaan yang dilakukan sistematis, pengendalian internal juga bertugas memeriksa kembali pekerjaan masing – masing bagian dalam perusahaan apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum.

Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Krismiaji 2010:218).

Menurut Pusat Studi Pengembangan Informasi Nasional (PSPIN) dalam Workshop Audit Resiko Kredit Bank (2015), fungsi dari sistem pengendalian internal adalah :

- Menjaga dan mengamankan harta perusahaan
- Menjamin tersedianya laporan yang akurat
- Meningkatkan kepatuhan

- Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan, kecurangan & pelanggaran prinsip kehati – hatian
 - Meningkatkan efektifitas organisasi dan efisien
- dengan fungsi sedemikian rupa, sistem pengendalian internal menjadi salah satu bagian terpenting dalam perusahaan.

3.2.2 Kredit

Praktik perkreditan di negara kita sudah lama berlangsung lama. Sehingga kata kredit sudah menjadi istilah yang umum digunakan masyarakat. Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dapat mengembalikan(membayar kembali) kredit yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Transaksi kredit timbul karena suatu pihak meminjam sejumlah uang atau sesuatu yang dipersamakan dengan itu, di mana pihak peminjam wajib melunasi kredit atau hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Disamping itu kredit pun timbul sebagai akibat adanya transaksi jual beli, dimana pembayarannya ditangguhkan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Dalam hubungannya dengan kredit sebagai usaha pokok bank, maka kredit didefinisikan sebagai (Undang•Undang Perbankan No 7 Tahun 1998) :

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam•meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunas utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Rumusan tersebut mengandung makna bahwa lembaga keuangan yang salah satunya Koperasi Simpan Pinjam menjembatani kesulitan yang ada dimasyarakat dalam hal keuangan. Manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, dengan bantuan keuangan dari bank atau lembaga keuangan yang lain dapat memenuhi kebutuhannya itu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan kredit merupakan suatu usaha pemberian prestasi baik berupa barang, jasa, atau uang dari suatu pihak (pemberi kredit) kepada pihak lain (penerima kredit) atas dasar kepercayaan dimana penerima kredit harus mengembalikan kredit yang diberikan pada waktu tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi (balas jasa) berupa bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Terdapat unsur- unsur dalam pemberian pada fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

- a) Kepercayaan Keyakinan bahwa apa yang diberikan oleh pemberi kredit akan diterima kembali pada waktu tertentu.
- b) Waktu Yaitu jarak antara saat pemberian kredit dengan saat pengembaliannya.
- c) Risiko (*Degree of risk*) suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan saat pengembaliannya.
- d) Prestasi yaitu objek kredit yang diberikan, bisa dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa.
- e) Kesepakatan dalam suatu perjanjian yang setiap pihak (si pemberi kredit kepada si penerima kredit) menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan berada dalam suatu akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

Adapun analisis kredit yang dilakukan petugas koperasi sama seperti perbankan meliputi analisis 5C sebagai berikut :

- Character

yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam yang mengajukan kredit.

- Capacity

yaitu kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya.

- Capital

yaitu mengetahui aset yang dimiliki oleh nasabah sebagai calon peminjam.

- Collateral

yaitu jaminan yang diberikan oleh calon peminjam kepada bank saat mengajukan kredit.

- Condition

Yaitu kondisi perekonomian pada bidang usaha nasabah.

3.3 Metode yang digunakan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam laporan hasil kerja praktek ini adalah dengan cara dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencatat dan memfoto langsung dokumen – dokumen mengenai prosedur pemberian kredit mulai dari permohonan pengajuan kredit oleh anggota hingga penyelesaian pelunasan kredit.

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan yang berkaitan dengan prosedur dalam pemberian kredit dan bagaimana sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit. Dokumentasi dan wawancara dilakukan secara langsung pada saat kegiatan kerja praktek dilaksanakan.

3.4 Rancangan Program yang akan dilakukan

Dengan melihat masalah yang telah diidentifikasi, maka rancangan program atau solusi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

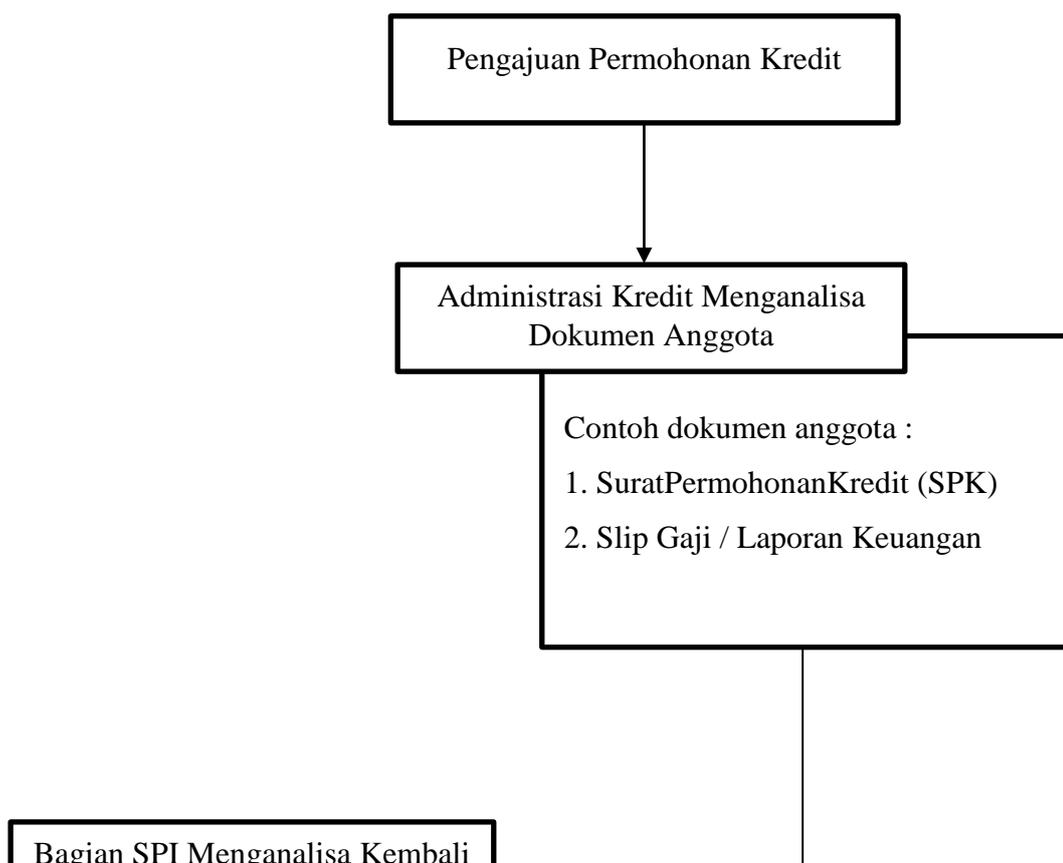
3.4.1 Menyarankan kepada bagian pengendalian internal untuk membantu menganalisa dokumen permohonan pengajuan kredit yang diajukan oleh anggotakoperasi.

Pada tahap pertama pengajuan kredit, anggota melengkapi beberapa dokumen yang harus dilengkapi, contohnya seperti mengisi surat permohonan kredit, melampirkan slip gaji yang merupakan lampiran dari SPK yang berisi gaji bersih pegawai, potongan gaji, dan sisagaji.

Bagian analisis kredit akan melakukan analisa dokumen anggota yang mengajukan kredit tersebut untuk menentukan apakah anggota tersebut

layak diberikan kredit / pinjaman. Sebelumnya mengingat jumlah anggotakoperasisebanyak 208 orang danprosedurpemberiankreditmerupakan sebagai barisan pertahanan, apabila prosedurpemberiankredit tidak jelas, pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas yang kadang-kadang luput dari perhatian manajemen. Sehingga ketidakcermatan dalam menganalisa terkadang dapat terjadi, oleh sebab itu saya menyarankan kepada bagian pengendalian internal untuk membantu menganalisa dokumen anggotakoperasitersebut sehingga kesalahan dalam menganalisa kecil kemungkinannya untuk terjadi.

Bagian pengendalian internal membantu menganalisa seperti contoh besarnya penghasilan dengan jumlah kredit yang diajukan, apakah anggotakoperasi yang mengajukankredittersebutmampu melunasi hutangnya.



Gambar 3.4.1 Rancangan Program 1

3.4.2 Menyarankan kepada bagian pengendalian internal untuk membantu dalam hal memantau / monitoring saat kredit diberikan dan setelah kredit diberikan kepadaanggotakoperasi.

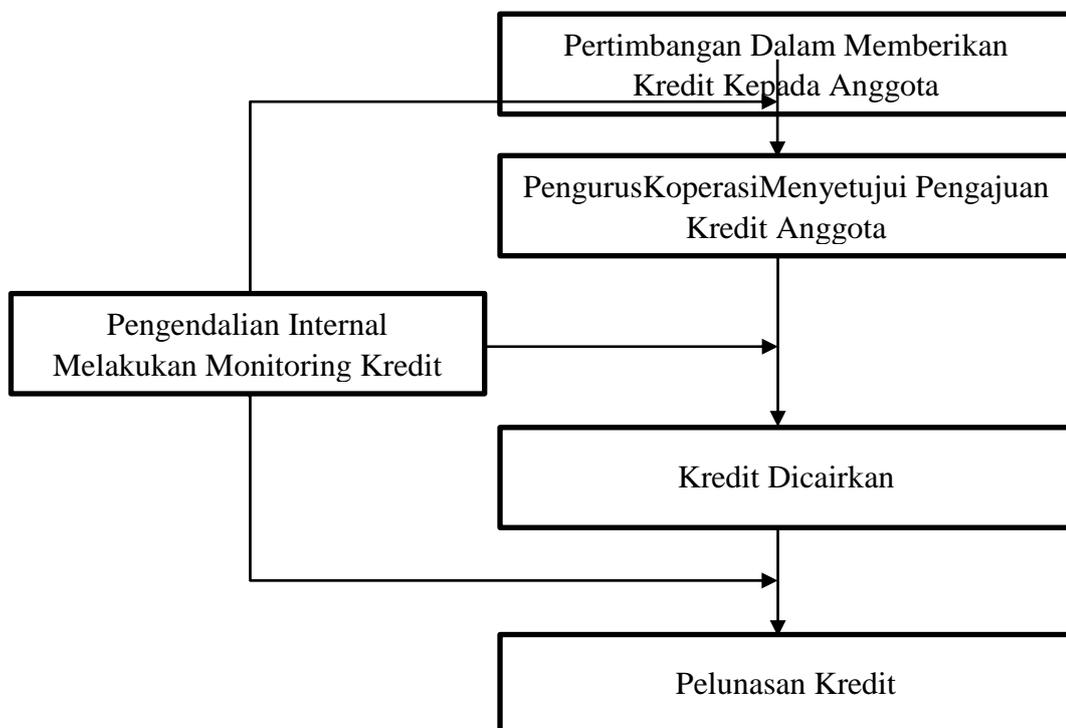
Pemantauan kredit atau monitoring kredit dimulai dengan memantau pihak penguruskoperasi pada saat pemberian persetujuan kredit, apakah kredit yang diberikan itu tepat sasaran atau tidak, tepat sasaran artinya kredit yang diberikan kepada anggotakoperasi sesuai dengan penghasilananggotatersebut. Kemudian kredit diberikan sesuai dengan prosedur atau tidak, semua itu perlu dipantau oleh bagian pengendalian internal untuk menghindari penunggakankredit di kemudian hari.

Setelah proses analisa dilakukan oleh bagian analis kredit dan bagian pengendalian internal, kedua bagian tersebut menentukan apakah anggotatersebut layak diberikan kredit atau tidak, mereka memberikan pendapat mereka masing – masing berdasarkan hasil analisa mereka. Kemudian memberikan dokumen anggota yang mengajukankredit tersebut kepada bagianpenguruskoperasi, untuk kemudian ditindaklanjuti bersama.

Jika penguruskoperasi memberikan persetujuan pemberian kredit, maka dalam hal pembayaran angsuran, bagianpenguruskoperasiharus memantau

masing – masing anggotakoperasiuntuk melihat apakah anggotatersebut membayarnya tepat waktusehinggatidakadapenunggakan. Untuk anggota yang pembayarannya lewat dari tanggal jatuh tempo/menunggakharus segera diingatkan kembali denganmemberisuratperingatankepadaanggota yang menunggak.

Dengan banyaknya anggota yang dipantau olehpenguruskoperasi, kemungkinan kelalaian dapat terjadi, sehingga tidakada anggota yang pembayaran angsurannya bermasalah atau biasadisebutdenganpenunggakan. Oleh sebab itu saya menyarankan kepada bagian pengendalian internal untuk ikut membantu memantau anggotatersebut dalam hal pembayaran angsuran sehingga kemungkinan kredit bermasalah kecil terjadi.



Gambar 3.4.2 Rancangan Program